

PENULISAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BITCOIN SEBAGAI ASET DIGITAL
UNTUK JAMINAN KEBENDAAN DI INDONESIA



Diajukan oleh:

Gregorius Tri Wahyu Nugroho

NPM : 210514183

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BITCOIN SEBAGAI ASET DIGITAL
UNTUK JAMINAN KEBENDAAN DI INDONESIA**



Diajukan oleh:

Gregorius Tri Wahyu Nugroho

NPM	: 210514183
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal: 14 Oktober 2024

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan:



HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BITCOIN SEBAGAI ASET DIGITAL
UNTUK JAMINAN KEBENDAAN DI INDONESIA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 18 November 2025

Tempat : Ruang Pendadaran Lt. III (R.Transit)

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. E. Imma Indra Dewi W., S.H., M.Hum.

Anggota : Etty Indrawati, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.
iii

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Bapa di Surga bersama dengan putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus atas rahmat dan berkat kasih karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penelitian skripsi ini yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BITCOIN SEBAGAI ASET DIGITAL UNTUK JAMINAN KEBENDAAN DI INDONESIA”. Penulisan penelitian hukum ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam pencapaian jenjang Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam hal ini, penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini:

1. Ibu Prof. Dr. Th Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M, selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sangat sabar telah memberikan arahan, membimbing, dan mendampingi penulis dalam proses penulisan hukum dan proses perkuliahan.
3. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Kepada orang tua penulis, Bapak Yakobus Sarkowi, Ibu Bernadetha Sri Sudarti, yang sudah memberikan saya izin untuk merantau di luar kota dan selalu mendukung, mendoakan saya dengan cinta dan kasih sayang sehingga

penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

5. Kepada Saudara Penulis, Kakak Brigitta Shinta Hapsari, dan Kakak FX. Ivan Dwi Kurniawan yang selalu memberi semangat, dukungan, dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini.
6. Kepada Kekasih Penulis, Septia Adera Lukmawati yang telah memberi semangat, dukungan, dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini.
7. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa kemampuan penulis masih jauh dari kata sempurna. Hendaknya pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun agar dapat membantu penyempurnaan skripsi/penulisan hukum ini menjadi lebih baik.

Yogyakarta, 14 Oktober 2025

Penulis



Gregorius Tri Wahyu Nugroho

ABSTRACT

The development of digital technology has given rise to innovations such as cryptocurrency, with Bitcoin being one of the most prominent. Its growing use as an investment instrument has led to new legal questions, particularly concerning its potential use as an object of property security in Indonesia. This study aims to analyze the legal relationship between Bitcoin buyers and sellers and to examine whether Bitcoin can be used as collateral under Indonesian law. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The results show that the legal relationship between Bitcoin buyers and sellers constitutes a civil relationship arising from a sale and purchase agreement as regulated in the Indonesian Civil Code (KUHPerdota). Furthermore, Bitcoin can be legally categorized as an intangible movable asset that has economic value and can be transferred, thus fulfilling the requirements to serve as an object of property security through fiduciary guarantees under Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Security. However, the high volatility of Bitcoin's value and the absence of specific regulations governing digital asset guarantees have led to legal uncertainty in practice. Therefore, clearer and more comprehensive regulations are necessary to ensure legal certainty and protection for parties involved in digital asset-based security transactions.

Keyword: Bitcoin, Digital Asset, Property Security, Fiduciary, Civil Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iiiv
ABSTRACT.....	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
BAB II.....	18
PEMBAHASAN	18
A. Bitcoin.....	18
B. Aset Digital	28
C. Jaminan Kebendaan	35
D. Bitcoin Sebagai Aset Digital Untuk Jaminan Kebendaan.....	42
BAB III	52
PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi/penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi/penulisan hukum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Oktober 2025

Yang menyatakan,



Gregorius Tri Wahyu Nugroho